

## **PT Jasa Armada Indonesia**

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2016 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
beserta laporan auditor independen

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN  
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT  
PT JASA ARMADA INDONESIA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dawam Atmosudiro  
Alamat kantor : Komplek Gedung Rukindo  
Jl. Raya Ancol baru, Ancol Timur,  
Jakarta Utara  
Alamat domisili : Jl. Alur Laut No. 601, RT. 008, RW. 007  
Rawa Badak Selatan  
Koja, Jakarta Utara  
Jabatan : Direktur Utama

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Jasa Armada Indonesia ("Perusahaan") tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.
2. Laporan keuangan Perusahaan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan  
b. Laporan keuangan Perusahaan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 2 Oktober 2017

  
DIREKSI  
PT Jasa Armada  
JAKARTA **Dawam Atmosudiro**  
Direktur Utama

**PT JASA ARMADA INDONESIA**  
**LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**Daftar Isi**

	Halaman
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan .....	1 - 2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain .....	3
Laporan Perubahan Ekuitas.....	4
Laporan Arus Kas.....	5
Catatan atas Laporan Keuangan .....	6-34

\*\*\*\*\*

## Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-5375/PSS/2017

### **Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Jasa Armada Indonesia**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Jasa Armada Indonesia ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Kami juga telah menguji: (i) kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan terlampir, dan (ii) pengendalian internal Perusahaan.

### **Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan tersebut, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### **Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara ("SPKN") yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ("BPK"). Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

## Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-5375/PSS/2017 (lanjutan)

### Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan SPKN yang ditetapkan oleh BPK juga mencakup pengujian atas: (i) kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan entitas, dan (ii) pengendalian internal entitas.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Jasa Armada Indonesia tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### Penekanan suatu hal

Seperti yang diungkapkan pada Catatan 28 atas laporan keuangan terlampir, Perusahaan menerbitkan dan menyajikan kembali laporan keuangannya tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sehubungan dengan koreksi atas akun-akun tertentu. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

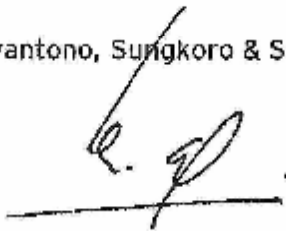
Laporan No. RPC-5375/PSS/2017 (lanjutan)

**Hal-hal lain**

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. RPC-3245/PSS/2017 bertanggal 17 Februari 2017 atas laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sebelum pencorban dan penyajian kembali laporan keuangan tersebut di atas.

Kami telah menerbitkan secara terpisah laporan-laporan bertanggal 17 Februari 2017 masing-masing atas: (i) kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan, dan (ii) pengendalian internal Perusahaan.

Purwantono, Sungkoro & Surja



**Moch. Dadang Syachruna**  
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0697

2 Oktober 2017

**PT JASA ARMADA INDONESIA**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2016**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
		<u>Disajikan Kembali, Catatan 28</u>	
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan bank	4,23,25	56.206.568.849	87.998.806.433
Piutang usaha	5,25		
Pihak ketiga		16.190.563.666	381.825.007
Pihak berelasi	23	321.745.309.796	333.490.901.720
Pendapatan yang masih akan diterima	6,25		
Pihak ketiga		808.143.496	7.255.605.075
Pihak berelasi	23	6.603.516.628	-
Piutang lain-lain	7,25		
Pihak ketiga		4.179.454	482.529.189
Pihak berelasi	23	96.835.856.442	27.396.049.953
Uang muka	8	437.603.559	240.881.000
Beban dibayar di muka	9	7.963.147.548	3.098.483.761
Pajak dibayar di muka	16a	20.437.193.463	6.311.035.749
<b>Total Aset Lancar</b>		<b>527.232.082.901</b>	<b>466.656.117.887</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Aset pajak tangguhan	16e	8.822.429.844	6.897.014.058
Tagihan restitusi pajak	16d	25.366.501.469	-
Aset tetap - neto	10	24.900.104.684	28.046.631.248
Beban tangguhan - neto	11	12.049.074.756	-
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>		<b>71.138.110.753</b>	<b>34.943.645.306</b>
<b>TOTAL ASET</b>		<b>598.370.193.654</b>	<b>501.599.763.193</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PT JASA ARMADA INDONESIA**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2016**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
<u>Disajikan Kembali, Catatan 28</u>			
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Utang usaha	12,25		
Pihak ketiga		9.125.075.334	2.336.650.176
Pihak berelasi	23	113.930.479.182	15.776.219.358
Utang lain-lain	13,25		
Pihak ketiga		8.071.533.323	5.116.627.860
Pihak berelasi	23	29.473.317.111	14.811.070.171
Uang titipan	14,25	2.214.818.317	847.876.281
Beban akrual	15,25	88.761.896.324	112.174.913.591
Utang pajak	16b	10.058.653.877	64.256.655.176
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>261.635.773.468</b>	<b>215.320.012.613</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham			
Modal dasar - 100.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 58.000 saham	17	58.000.000.000	58.000.000.000
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	18	20.077.924.638	20.077.924.638
Belum ditentukan penggunaannya		258.656.495.548	208.201.825.942
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>336.734.420.186</b>	<b>286.279.750.580</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>598.370.193.654</b>	<b>501.599.763.193</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



**PT JASA ARMADA INDONESIA**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Tahun yang berakhir pada tanggal	
		31 Desember 2016	31 Desember 2015
		<b>Disajikan Kembali, Catatan 28</b>	
Pendapatan - neto	19,23	827.606.688.521	873.952.137.231
Beban usaha	20,23	(651.089.717.104)	(622.351.064.526)
Pendapatan operasi lainnya	21a	67.892.582	36.357.049.222
Beban operasi lainnya	21b	(7.525.889.959)	(134.604.984)
<b>LABA USAHA</b>		<b>169.058.974.040</b>	<b>287.823.516.943</b>
Pendapatan keuangan	22a,23	845.879.608	637.406.091
Beban keuangan	22b,23	(106.008.495)	(71.378.530)
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN</b>		<b>169.798.845.153</b>	<b>288.389.544.504</b>
<b>MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN BADAN</b>			
Kini	16d	(54.660.157.651)	(84.262.597.500)
Tangguhan	16e	1.925.415.786	4.482.486.678
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>		<b>117.064.103.288</b>	<b>208.609.433.682</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		-	-
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>117.064.103.288</b>	<b>208.609.433.682</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PT JASA ARMADA INDONESIA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	Saldo laba			Total
		Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	
<b>Saldo pada tanggal 1 Januari 2015</b>		<b>58.000.000.000</b>	-	<b>49.787.203.856</b>	<b>107.787.203.856</b>
Pembentukan cadangan umum, disajikan kembali (Catatan 28)	18, 28	-	20.077.924.638	(20.077.924.638)	-
Pembagian dividen	18	-	-	(30.116.886.958)	(30.116.886.958)
Total laba komprehensif tahun berjalan		-	-	208.609.433.682	208.609.433.682
<b>Saldo pada tanggal 31 Desember 2015, disajikan kembali (Catatan 28)</b>		<b>58.000.000.000</b>	<b>20.077.924.638</b>	<b>208.201.825.942</b>	<b>286.279.750.580</b>
Pembagian dividen	18	-	-	(66.609.433.682)	(66.609.433.682)
Total laba komprehensif tahun berjalan		-	-	117.064.103.288	117.064.103.288
<b>Saldo pada tanggal 31 Desember 2016, disajikan kembali (Catatan 28)</b>		<b>58.000.000.000</b>	<b>20.077.924.638</b>	<b>258.656.495.548</b>	<b>336.734.420.186</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PT JASA ARMADA INDONESIA**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	Tahun yang berakhir pada tanggal	
		31 Desember 2016	31 Desember 2015
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
Penerimaan dari pelanggan		823.387.486.736	700.399.564.745
Pembayaran kepada pemasok		(368.670.122.766)	(359.782.026.805)
Pembayaran untuk beban usaha		(7.811.962.040)	(37.452.677.899)
Pembayaran kepada karyawan		(205.981.046.994)	(193.673.741.183)
Penerimaan pendapatan keuangan		845.879.608	637.406.091
Pembayaran pajak penghasilan		(131.794.517.857)	(46.228.817.877)
Pembayaran beban keuangan		(106.008.495)	(71.378.530)
Pembayaran untuk kegiatan operasional lainnya		(75.052.512.094)	(37.508.959.273)
<b>Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi</b>		<b>34.817.196.098</b>	<b>26.319.369.269</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
Pembayaran dividen		(66.609.433.682)	(30.116.886.958)
<b>PENURUNAN NETO KAS DAN BANK</b>		<b>(31.792.237.584)</b>	<b>(3.797.517.689)</b>
<b>KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN</b>	4	<b>87.998.806.433</b>	<b>91.796.324.122</b>
<b>KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN</b>	4	<b>56.206.568.849</b>	<b>87.998.806.433</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PT JASA ARMADA INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**1. UMUM**

**a. Pendirian dan informasi umum**

PT Jasa Armada Indonesia ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta No. 24 tanggal 10 Juli 2013 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-47228.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 9 September 2013 serta telah diumumkan dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 27 September 2013.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan kegiatan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa maritim. Perusahaan saat ini bergerak dalam dalam bidang pelayanan jasa pemanduan, penundaan dan pengepilan kapal. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 1 September 2014 (Catatan 23b dan 23c).

Kantor Perusahaan berlokasi di Gedung Rukindo Lantai 1, Jl. Raya Ancol Baru, Ancol Timur, Jakarta Utara 14310.

Entitas induk Perusahaan adalah PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan entitas induk terakhirnya adalah Pemerintah Republik Indonesia.

**b. Manajemen kunci dan karyawan**

Susunan manajemen kunci Perusahaan, yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi, adalah sebagai berikut:

**31 Desember 2016**

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Dana Amin
Komisaris	: Urip Nurhayat
Komisaris	: Jimmy Abu Bakar Nikijuluw
Komisaris	: Eko Hadi Rumecko
Komisaris	: Raymond Ivan Hasudungan Antonias Sianturi

**Direksi**

Direktur Utama	: Dawam Atmosudiro
Direktur Operasi dan Komersial	: Supardi
Pelaksana Harian	
Direktur Armada dan Teknik	: Supardi
Direktur Keuangan dan SDM	: Sudarsono

**31 Desember 2015**

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Dana Amin
Komisaris	: Urip Nurhayat
Komisaris	: Jimmy Abu Bakar Nikijuluw

**Direksi**

Direktur Utama	: Dawam Atmosudiro
Direktur Operasi dan Komersial	: Supardi
Direktur Armada dan Teknik	: Bunyamin Syukur
Direktur Keuangan dan SDM	: Sudarsono

**PT JASA ARMADA INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**1. UMUM (lanjutan)**

**b. Manajemen kunci dan karyawan (lanjutan)**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2016 adalah berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 8 September 2016. Keputusan tersebut dinyatakan dalam Akta No. 42 tanggal 28 September 2016 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diterima melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0084940 tanggal 30 September 2016.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2015 adalah berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 22 Desember 2015. Keputusan tersebut dinyatakan dalam Akta No. 10 tanggal 18 Januari 2016 dari Devi Yuana Lisa, S.H., M.Kn., pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diterima melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0003705 tanggal 18 Januari 2016.

Jumlah gaji, tantiem dan tunjangan lainnya yang dibayar atau diakru kepada manajemen kunci Perusahaan adalah sebesar Rp6.777.080.906 dan Rp10.979.118.623 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (tidak diaudit).

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Perusahaan masing-masing memiliki 304 dan 350 orang karyawan (tidak diaudit), yang merupakan karyawan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), pihak berelasi, yang ditugaskan di Perusahaan (Catatan 2k). Perusahaan tidak memiliki karyawan tetap.

**c. Penyelesaian laporan keuangan**

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit pada tanggal 2 Oktober 2017. Direksi Perusahaan yang menandatangani Surat Pernyataan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan**

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual dengan dasar biaya historis, kecuali dinyatakan lain dalam catatan atas laporan keuangan terkait.

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disusun dengan metode langsung.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

**PT JASA ARMADA INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**b. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing**

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk tahun yang bersangkutan. Keuntungan atau kerugian selisih kurs neto yang timbul diakui pada laba rugi tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, kurs yang digunakan adalah masing-masing sebesar Rp13.436 dan Rp13.795 per \$AS1.

**c. Transaksi dengan pihak berelasi**

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi antara pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 23 dan catatan lainnya yang relevan.

**d. Instrumen keuangan**

**i) Aset keuangan**

Pengakuan awal

Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo dan aset keuangan tersedia untuk dijual, mana yang sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan dievaluasi kembali setiap akhir periode pelaporan.

Aset keuangan utama Perusahaan yang meliputi kas dan bank, piutang usaha, pendapatan yang masih akan diterima dan piutang lain-lain diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Aset keuangan tersebut diakui pertama kali pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dan keuntungan dan kerugian terkait diakui sebagai laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga melalui proses amortisasi.

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan (atau, apabila dapat diterapkan, untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) terjadi bila:

- (i) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau

**PT JASA ARMADA INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**d. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**i) Aset keuangan (lanjutan)**

Penghentian pengakuan (lanjutan)

Apabila Perusahaan mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan, atau tidak mentransfer maupun tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset keuangan baru diakui oleh Perusahaan sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Perusahaan. Dalam hal ini, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur atas dasar yang merefleksikan hak dan kewajiban Perusahaan yang ditahan.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi dengan liabilitas baru yang ditanggung, dan (ii) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas, harus diakui sebagai laba rugi.

Penurunan nilai

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan terlebih dahulu menentukan bahwa terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto dengan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku.

**PT JASA ARMADA INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**d. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**i) Aset keuangan (lanjutan)**

Penurunan nilai (lanjutan)

Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan pos penyisihan kerugian penurunan nilai dan jumlah kerugian yang terjadi diakui sebagai laba rugi. Pendapatan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya berdasarkan tingkat suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa depan untuk pengukuran rugi penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan dan piutang beserta dengan penyisihan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan telah terealisasi atau dialihkan kepada Perusahaan. Jika, pada tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan pos penyisihan kerugian penurunan nilai. Pemulihan tidak akan menghasilkan nilai tercatat dari aset keuangan melebihi biaya perolehan yang diamortisasi, jika penurunan nilai tidak diakui pada saat penurunan nilai tersebut dipulihkan. Jika di masa mendatang penghapusan tersebut dapat dipulihkan, maka jumlah pemulihan tersebut diakui sebagai laba rugi.

**ii) Liabilitas keuangan**

Pengakuan awal

Liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, utang dan pinjaman, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Perusahaan menetapkan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan utama Perusahaan yang meliputi utang usaha, utang lain-lain, uang titipan dan beban akrual diklasifikasikan sebagai utang dan pinjaman. Liabilitas keuangan tersebut diakui pertama kali pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Utang dan pinjaman dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan atas suatu liabilitas keuangan terjadi pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan, dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika suatu liabilitas keuangan yang saat ini ada digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan ketentuan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba rugi.



**PT JASA ARMADA INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**d. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**iii) Saling hapus instrumen keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**iv) Nilai wajar instrumen keuangan**

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (*arm's-length market transactions*), penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lainnya.

**e. Beban dibayar di muka**

Beban dibayar di muka dibebankan selama masa manfaat atau kontrak masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

**f. Aset tetap**

Aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penyisihan penurunan nilai.

Biaya perbaikan yang signifikan diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan digunakan dalam operasi selama lebih dari 1 (satu) tahun.

Penyusutan dimulai pada saat aset telah siap digunakan dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat aset sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Kapal	10

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diakui dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

**PT JASA ARMADA INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**f. Aset tetap (lanjutan)**

Pada setiap akhir periode pelaporan, nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan dievaluasi dan jika diperlukan, disesuaikan secara prospektif. Perusahaan melakukan uji penurunan nilai aset tetap bila terdapat indikasi bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

**g. Beban tangguhan**

Beban tangguhan diakui jika Perusahaan kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari beban tangguhan tersebut dan beban tangguhan tersebut dapat diukur secara andal.

Beban tangguhan diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, beban tangguhan dicatat pada nilai perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada.

Beban tangguhan diamortisasi selama umur manfaat dan dievaluasi apabila terdapat indikasi adanya penurunan nilai. Periode dan metode amortisasi untuk beban tangguhan direvisi setidaknya setiap akhir tahun buku.

**h. Penurunan nilai aset nonkeuangan**

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, atau apabila pengujian tahunan atas penurunan nilai aset tertentu disyaratkan, maka Perusahaan membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan suatu aset adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau unit penghasil kas dikurangi biaya untuk menjual, dengan nilai pakainya, dan ditentukan secara individual, kecuali apabila aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh pengali penilaian atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi tersebut ditemukan, maka Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui pada laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa masa manfaatnya.

**PT JASA ARMADA INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**i. Provisi**

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak lagi terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, provisi dibatalkan.

**j. Perpajakan**

Pajak final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Perusahaan menyajikan beban pajak final atas pendapatan keuangan sebagai bagian dari beban operasi lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pajak kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Kekurangan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perusahaan menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari beban operasi lainnya.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

Pajak tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif telah diberlakukan pada tanggal pelaporan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai manfaat/beban pajak tangguhan dan termasuk dalam laba rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan diturunkan apabila penghasilan kena pajak mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Perusahaan mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada laba rugi periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

**PT JASA ARMADA INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**k. Imbalan kerja karyawan**

Seluruh karyawan tetap Perusahaan yang memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan imbalan kerja sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan karyawan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) ("IPC"), pihak berelasi, yang ditugaskan di Perusahaan. Perhitungan dan kewajiban pembayaran dilakukan oleh IPC, sementara Perusahaan memiliki kewajiban membayarkannya kepada IPC sehingga disajikan sebagai utang lain-lain - pihak berelasi dalam laporan posisi keuangan.

**l. Pengakuan pendapatan dan beban**

Pendapatan jasa diakui pada saat jasa dilaksanakan sesuai prestasi dan bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh Perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk reduksi pendapatan dan pajak pertambahan nilai.

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual) atau sesuai dengan masa manfaatnya.

**m. Peristiwa setelah periode pelaporan**

Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan informasi tambahan mengenai posisi keuangan Perusahaan pada tanggal pelaporan ("peristiwa penyesuaian"), jika ada, dicerminkan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah periode pelaporan yang bukan peristiwa penyesuaian diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jika material.

**n. Standar akuntansi yang telah disahkan namun belum berlaku efektif**

Berikut ini adalah beberapa standar akuntansi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Perusahaan.

Berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017

Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang "Prakarsa Pengungkapan". Amandemen PSAK No. 1 memberikan klarifikasi terkait penerapan persyaratan materialitas, fleksibilitas urutan sistematis catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan.

Perusahaan sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan.

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang diakui dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi dan asumsi, hasil sebenarnya yang diakui di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat. Estimasi dan pertimbangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

**Pertimbangan**

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

**PT JASA ARMADA INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Pertimbangan (lanjutan)**

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2d.

Penyisihan penurunan nilai piutang

Perusahaan melakukan evaluasi apabila terdapat informasi bahwa pelanggan tertentu tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Perusahaan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan, kualitas jaminan yang diterima dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat suatu penyisihan atas jumlah piutang usaha pelanggan tersebut guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat ditagih oleh Perusahaan. Penyisihan ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlahnya.

Bila Perusahaan memutuskan bahwa tidak terdapat bukti obyektif atas penurunan nilai untuk piutang usaha yang dievaluasi secara individual, baik yang nilainya signifikan maupun tidak, Perusahaan menyertakannya dalam kelompok piutang usaha dengan risiko kredit yang serupa karakteristiknya dan melakukan evaluasi secara kolektif atas penurunan nilai. Karakteristik yang dipilih mempengaruhi estimasi arus kas masa depan atas kelompok piutang usaha tersebut karena merupakan indikasi bagi kemampuan pelanggan untuk melunasi jumlah terutang. Arus kas masa depan pada kelompok piutang usaha yang dievaluasi secara kolektif untuk penurunan nilai diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian historis bagi piutang usaha dengan karakteristik risiko kredit yang serupa dengan piutang usaha pada kelompok tersebut.

Nilai tercatat piutang usaha dan piutang lain-lain diungkapkan dalam Catatan 5 dan 7. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap keadaan piutang usaha dan piutang lain-lain pada tanggal pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai piutang.

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana Perusahaan beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang terutama mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan.

**Estimasi dan asumsi**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang berada di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

**PT JASA ARMADA INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Estimasi dan asumsi (lanjutan)**

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, saat dan jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metode penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba rugi Perusahaan.

Estimasi nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam Catatan 25.

Masa manfaat aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Perusahaan diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang, serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, laba rugi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Estimasi masa manfaat aset tetap diungkapkan pada Catatan 2f. Tidak terdapat perubahan estimasi masa manfaat aset tetap selama periode pelaporan.

Penurunan nilai aset nonkeuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada laba rugi Perusahaan.

Nilai tercatat aset tetap pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp24.900.104.684 dan Rp28.046.631.248. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 10.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset tetap pada tanggal pelaporan.

Pajak kini

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan beban pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu dalam kegiatan usaha normal yang penentuan pajak akhirnya belum dapat dipastikan. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak.

Perhitungan pajak kini diungkapkan dalam Catatan 16d.

**PT JASA ARMADA INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Estimasi dan asumsi (lanjutan)**

Pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak, jika besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui, berdasarkan kemungkinan waktu realisasi dan jumlah penghasilan kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Perhitungan pajak tangguhan diungkapkan dalam Catatan 16e.

**4. KAS DAN BANK**

	<b>31 Desember 2016</b>	<b>31 Desember 2015</b>
<b>Kas</b>	114.031.601	80.805.639
<b>Bank</b>		
Pihak ketiga		
Rupiah		
PT CIMB Niaga Tbk	4.427.625	-
Dolar AS		
PT CIMB Niaga Tbk	12.612.910	-
Subtotal pihak ketiga	17.040.535	-
Pihak berelasi (Catatan 23)		
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	36.457.878.549	56.110.967.462
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	29.391.060	2.015.369.955
Dolar AS		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	19.570.547.478	29.773.099.445
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	17.679.626	18.563.932
Subtotal pihak berelasi	56.075.496.713	87.918.000.794
<b>Total</b>	<b>56.206.568.849</b>	<b>87.998.806.433</b>

**5. PIUTANG USAHA**

	<b>Disajikan Kembali, Catatan 28</b>	
	<b>31 Desember 2016</b>	<b>31 Desember 2015</b>
Pihak ketiga	16.190.563.666	381.825.007
Pihak berelasi (Catatan 23)		
PT Pelabuhan Tanjung Priok	205.737.295.738	150.322.700.179
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	110.729.057.987	170.296.427.754
PT IPC Terminal Petikemas	5.278.956.071	12.871.773.787
Subtotal pihak berelasi	321.745.309.796	333.490.901.720
<b>Total</b>	<b>337.935.873.462</b>	<b>333.872.726.727</b>

**PT JASA ARMADA INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**6. PENDAPATAN YANG MASIH AKAN DITERIMA**

	<b>31 Desember 2016</b>	<b>31 Desember 2015</b>
Pihak ketiga		
PT Pancaran Haluan Samudera	51.780.436	849.123.589
PT Swadaya Wira Maritim	13.015.348	782.153.722
PT Bahari Sandi Pratama	1.674.647	1.297.946.007
PT Foechs Sutra Bhakti	-	856.582.826
PT Lestari Samudera Jaya Pratama	-	744.885.927
PT Bahtera Bestari Shipping	-	667.115.165
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500.000.000)	741.673.065	2.057.797.839
Subtotal pihak ketiga	<u>808.143.496</u>	<u>7.255.605.075</u>
Pihak berelasi (Catatan 23)		
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	5.765.584.718	-
PT Pelabuhan Tanjung Priok	815.640.374	-
PT IPC Terminal Petikemas	22.291.536	-
Subtotal pihak berelasi	<u>6.603.516.628</u>	<u>-</u>
<b>Total</b>	<b><u>7.411.660.124</u></b>	<b><u>7.255.605.075</u></b>

**7. PIUTANG LAIN-LAIN**

	<b>Disajikan Kembali, Catatan 28</b>	
	<b>31 Desember 2016</b>	<b>31 Desember 2015</b>
Pihak ketiga		
Klaim kelebihan pembayaran	4.179.454	482.529.189
Pihak berelasi (Catatan 23)		
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	96.835.856.442	27.396.049.953
<b>Total</b>	<b><u>96.840.035.896</u></b>	<b><u>27.878.579.142</u></b>

Piutang lain-lain kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) terutama merupakan piutang atas biaya pemeliharaan dan perawatan fasilitas pandu, tunda dan kepil tingkat IV (Catatan 23a).

**8. UANG MUKA**

	<b>31 Desember 2016</b>	<b>31 Desember 2015</b>
Karyawan	437.603.559	240.881.000
<b>Total</b>	<b><u>437.603.559</u></b>	<b><u>240.881.000</u></b>



**PT JASA ARMADA INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**9. BEBAN DIBAYAR DI MUKA**

	<b>31 Desember 2016</b>	<b>31 Desember 2015</b>
Asuransi	4.377.386.337	-
Karyawan	3.008.521.911	3.098.483.761
Sewa	577.239.300	-
<b>Total</b>	<b>7.963.147.548</b>	<b>3.098.483.761</b>

**10. ASET TETAP**

	<b>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016</b>			
	<b>Saldo awal</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Saldo akhir</b>
<b>Biaya perolehan</b> Kapal	32.242.000.000	-	-	32.242.000.000
<b>Akumulasi penyusutan</b> Kapal	4.195.368.752	3.146.526.564	-	7.341.895.316
<b>Nilai buku neto</b>	<b>28.046.631.248</b>			<b>24.900.104.684</b>

	<b>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015</b>			
	<b>Saldo awal</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Saldo akhir</b>
<b>Biaya perolehan</b> Kapal	32.242.000.000	-	-	32.242.000.000
<b>Akumulasi penyusutan</b> Kapal	1.048.842.188	3.146.526.564	-	4.195.368.752
<b>Nilai buku neto</b>	<b>31.193.157.812</b>			<b>28.046.631.248</b>

Beban penyusutan seluruhnya dialokasikan pada beban usaha (Catatan 20).

**11. BEBAN TANGGUHAN**

	<b>31 Desember 2016</b>	<b>31 Desember 2015</b>
Beban tangguhan	18.073.612.134	-
Akumulasi amortisasi	(6.024.537.378)	-
<b>Total</b>	<b>12.049.074.756</b>	<b>-</b>

Beban tangguhan terdiri dari beban yang dikeluarkan Perusahaan sehubungan dengan implementasi sistem, jasa konsultasi dan *mentoring Basic Ship Management Fleet* antara Perusahaan dan Thome Marine Consultant Ltd., Singapura dan beban pendidikan dan pelatihan pelaut berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pelaut dengan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (Catatan 24).

**PT JASA ARMADA INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**12. UTANG USAHA**

	<b>Disajikan Kembali, Catatan 28</b>	
	<b>31 Desember 2016</b>	<b>31 Desember 2015</b>
Pihak ketiga		
PT Pandu Usaha Jaya	815.002.719	-
PT Exav Sarana Utama	703.108.116	-
PT Palka Sarana Utama	608.146.500	-
PT Terminal Jasa Karya	569.609.712	-
PT Kopegmar Mandiri	500.613.534	-
PT Sarana Multi Sejahtera	-	2.330.197.565
Wilhelmsen Ships Service		
- Norwegia	-	6.452.611
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500.000.000)	5.928.594.753	-
Subtotal pihak ketiga	<u>9.125.075.334</u>	<u>2.336.650.176</u>
Pihak berelasi (Catatan 23)		
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	113.810.037.875	14.604.024.301
PT IPC Terminal Petikemas	120.441.307	397.321.520
PT Pelabuhan Tanjung Priok	-	774.873.537
Subtotal pihak berelasi	<u>113.930.479.182</u>	<u>15.776.219.358</u>
<b>Total</b>	<b><u>123.055.554.516</u></b>	<b><u>18.112.869.534</u></b>

Saldo utang usaha pada akhir tahun tidak memiliki jaminan. Tidak ada surat jaminan yang diberikan maupun diterima untuk utang usaha.

**13. UTANG LAIN-LAIN**

	<b>31 Desember 2016</b>	<b>31 Desember 2015</b>
Pihak ketiga		
Uang pertanggungan	8.071.533.323	3.985.219.855
Bank garansi	-	1.131.408.005
Subtotal pihak ketiga	<u>8.071.533.323</u>	<u>5.116.627.860</u>
Pihak berelasi (Catatan 23)		
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	29.473.317.111	14.811.070.171
<b>Total</b>	<b><u>37.544.850.434</u></b>	<b><u>19.927.698.031</u></b>

Utang lain-lain kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) seluruhnya merupakan utang imbalan kerja karyawan atas karyawan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang ditugaskan di Perusahaan.

**14. UANG TITIPAN**

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, akun ini seluruhnya merupakan uang titipan karyawan.

**PT JASA ARMADA INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**15. BEBAN AKRUAL**

	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
Gaji, tunjangan dan kesejahteraan karyawan	42.995.833.530	30.482.355.322
Pemeliharaan kapal	21.802.411.654	52.460.875.989
Kerja sama mitra usaha	15.831.772.967	5.519.458.115
Bahan bakar dan pelumas	3.812.660.080	14.765.550.577
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	3.465.600.723	7.705.327.223
Renovasi kantor	94.725.500	250.068.990
Perjalanan dinas	19.530.000	330.183.700
Lain-lain	739.361.870	661.093.675
<b>Total</b>	<b><u>88.761.896.324</u></b>	<b><u>112.174.913.591</u></b>

**16. PERPAJAKAN**

**a. Pajak dibayar di muka**

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, pajak dibayar dimuka seluruhnya merupakan lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai.

**b. Utang pajak**

	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
Pajak penghasilan		
Pasal 4 (2)	759.872.038	710.956.825
Pasal 15	29.790.021	51.250.460
Pasal 21	2.596.746.263	4.955.738.631
Pasal 23	283.539.449	445.529.137
Pasal 25	6.325.321.386	1.671.616.708
Pasal 26	63.384.720	-
Pasal 29	-	56.421.563.415
<b>Total</b>	<b><u>10.058.653.877</u></b>	<b><u>64.256.655.176</u></b>

**c. Beban pajak penghasilan**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan yang dikalikan tarif pajak yang berlaku dengan beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	<b>Disajikan Kembali, Catatan 28</b>	
	<b>Tahun yang berakhir pada tanggal</b>	
	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
Laba sebelum pajak penghasilan	169.798.845.153	288.389.544.504
Beban pajak penghasilan pada tarif pajak 25%	(42.449.711.288)	(72.097.386.126)
Pengaruh perbedaan permanen pada tarif pajak 25%	(10.285.030.577)	(7.188.047.942)
Pengaruh penyesuaian aset pajak tangguhan	-	(494.676.906)
Pengaruh pembulatan penghasilan kena pajak	-	152
<b>Beban pajak penghasilan</b>	<b><u>(52.734.741.865)</u></b>	<b><u>(79.780.110.822)</u></b>

**PT JASA ARMADA INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**16. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**d. Pajak kini**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

	<b>Disajikan Kembali, Catatan 28</b>	
	<b>Tahun yang berakhir pada tanggal</b>	
	<b>31 Desember 2016</b>	<b>31 Desember 2015</b>
Laba sebelum pajak penghasilan	169.798.845.153	288.389.544.504
Perbedaan temporer		
Beban bonus	6.570.261.580	18.777.252.772
Penyusutan aset tetap	1.131.401.564	1.131.401.564
Perbedaan permanen		
Beban kesejahteraan karyawan, imbalan kerja dan beban lainnya	37.168.803.382	26.821.870.351
Beban promosi dan pemasaran	4.676.667.563	2.439.729.534
Beban pajak final	140.530.967	127.997.972
Pendapatan keuangan yang dikenakan pajak final	(845.879.608)	(637.406.091)
<b>Taksiran penghasilan kena pajak</b>	<b>218.640.630.601</b>	<b>337.050.390.606</b>

Perhitungan taksiran utang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	<b>Disajikan Kembali, Catatan 28</b>	
	<b>Tahun yang berakhir pada tanggal</b>	
	<b>31 Desember 2016</b>	<b>31 Desember 2015</b>
Beban pajak kini	54.660.157.651	84.262.597.500
Dikurangi: Pajak penghasilan dibayar di muka	80.026.659.120	27.841.034.085
<b>Taksiran utang (restitusi) pajak penghasilan</b>	<b>(25.366.501.469)</b>	<b>56.421.563.415</b>

Perusahaan menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan atas dasar perhitungan sendiri (*self-assessment*), sesuai dengan perubahan terakhir atas Undang-undang dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2008. Kantor pajak dapat menetapkan atau mengubah besarnya kewajiban pajak dalam batas waktu 5 tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

**e. Pajak tangguhan**

Perhitungan manfaat pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

	<b>Tahun yang berakhir pada tanggal</b>	
	<b>31 Desember 2016</b>	<b>31 Desember 2015</b>
Pengaruh perbedaan temporer pada tarif pajak 25%		
Beban bonus	1.642.565.395	4.694.313.193
Penyusutan aset tetap	282.850.391	282.850.391
Penyesuaian	-	(494.676.906)
<b>Neto</b>	<b>1.925.415.786</b>	<b>4.482.486.678</b>

**PT JASA ARMADA INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**16. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**e. Pajak tangguhan (lanjutan)**

Rincian aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2016</b>	<b>31 Desember 2015</b>
Beban bonus	8.162.445.598	6.519.880.203
Penyusutan aset tetap	659.984.246	377.133.855
<b>Total</b>	<b>8.822.429.844</b>	<b>6.897.014.058</b>

Manajemen berpendapat bahwa aset pajak tangguhan dapat terpulihkan seluruhnya terhadap penghasilan kena pajak dimasa yang akan datang sebelum masa manfaat pajak tersebut berakhir.

**17. MODAL SAHAM**

Susunan kepemilikan saham pada Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

<b>Pemegang saham</b>	<b>Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>Persentase kepemilikan</b>	<b>Total nilai nominal</b>
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	57.420	99,00%	57.420.000.000
PT Multi Terminal Indonesia	580	1,00%	580.000.000
<b>Total</b>	<b>58.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>58.000.000.000</b>

Modal dasar Perusahaan berjumlah Rp100.000.000.000 yang terbagi atas 100.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 58.000 saham dengan total nilai nominal Rp58.000.000.000.

**18. CADANGAN UMUM DAN DIVIDEN**

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pertanggungjawaban Laporan Tahunan Tahun Buku 2015 No. HK.568/30/6/3/PI.II-16 tanggal 30 Juni 2016, ditetapkan penggunaan laba bersih tahun buku 2015 untuk penyertaan modal saham dan dividen masing-masing sebesar Rp142.0000.000.000 dan Rp66.609.433.682. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, Perusahaan belum memperoleh persetujuan dari pemegang saham terkait penyertaan modal saham sebesar Rp142.000.000.000.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 No. UM.335/16/6/2/PI.II-15 tanggal 16 Juni 2015, ditetapkan penggunaan laba bersih tahun buku 2014 untuk cadangan umum dan dividen masing-masing sebesar Rp20.077.924.638 dan Rp30.116.886.958.

**PT JASA ARMADA INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**19. PENDAPATAN**

Pendapatan seluruhnya berasal dari jasa pemanduan, penundaan dan pengepilan kapal, dengan rincian sebagai berikut:

	<b>Disajikan Kembali, Catatan 28</b>	
	<b>Tahun yang berakhir pada tanggal</b>	
	<b>31 Desember 2016</b>	<b>31 Desember 2015</b>
Pihak ketiga		
PT Admiral Lines	17.884.937.795	-
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	4.898.879.673	-
PT Maskapai Pelayaran Pulau Laut	4.312.651.275	-
PT Bahari Sandi Pratama	3.658.534.195	-
PT Bukit Prima Bahari	2.581.714.789	-
PT Karya Pacific Shipping	2.399.000.000	773.000.000
PT Andalan Samudra	1.684.477.958	-
PT Tri Daya Laju	1.665.896.289	-
PT Usda Seroja Jaya	1.644.411.389	-
PT Bintang Samudra Utama	1.623.211.293	-
PT Pancaran Haluan Samudera	1.376.745.448	-
PT Bumi Laut Shipping Services	1.371.868.110	-
PT Arpeni Pratama Ocean Line	1.143.214.006	-
PT Bahtera Bestari Shipping	1.132.035.980	-
PT Adhiguna Putera	1.030.991.172	-
PT Dahlia Bina Utama	923.000.000	-
PT Sekai Lintas Samudera	900.608.085	-
PT Putra Segara Abadi	691.728.750	-
PT Pacific Samudra Sentosa	663.897.725	-
PT Penascop Maritim Indonesia	648.993.257	-
PT Karya Arun Marines	640.337.324	-
PT Unggul Samudra Raya	595.232.510	-
PT Wiratrans Samudera	541.926.000	-
PT Swadaya Wira Maritim	-	1.442.425.613
PT Lestari Samudera Jaya Pratama	-	562.507.867
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500.000.000)	17.870.760.799	7.125.890.306
Subtotal pihak ketiga	71.885.053.822	9.903.823.786
Pihak berelasi (Catatan 23)		
PT Pelabuhan Tanjung Priok	416.359.236.255	406.400.914.754
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	319.727.984.538	450.492.087.442
PT IPC Terminal Petikemas	21.435.529.780	13.351.356.814
PT Pertamina Trans Kontinental	4.479.706.485	-
PT Pertamina Marine	1.453.831.109	-
PT Pertamina (Persero)	21.334.032	-
Subtotal pihak berelasi	763.477.622.199	870.244.359.010
<b>Total pendapatan</b>	<b>835.362.676.021</b>	<b>880.148.182.796</b>
Dikurangi: Reduksi pendapatan	(7.755.987.500)	(6.196.045.565)
<b>Pendapatan - neto</b>	<b>827.606.688.521</b>	<b>873.952.137.231</b>

Reduksi pendapatan merupakan insentif yang diberikan kepada pelanggan yang memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan oleh Perusahaan, antara lain, tidak ada pembatalan atas kunjungan kapal, ketepatan waktu atas pembayaran nota dan pelanggan yang menggunakan *Cash Management System*.

**PT JASA ARMADA INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**20. BEBAN USAHA**

	<b>Tahun yang berakhir pada tanggal</b>	
	<b>31 Desember 2016</b>	<b>31 Desember 2015</b>
Karyawan	220.088.972.668	207.640.592.158
Sewa	124.360.312.331	91.645.179.032
Bahan	99.846.601.740	111.875.638.233
Kompensasi serah operasi (Catatan 23a)	68.961.000.000	84.740.841.408
Umum	60.877.826.490	57.133.221.911
Pemeliharaan	44.602.461.158	36.632.794.206
Asuransi	15.143.019.030	10.698.146.381
Administrasi kantor	14.062.997.123	18.838.124.633
Penyusutan (Catatan 10)	3.146.526.564	3.146.526.564
<b>Total</b>	<b>651.089.717.104</b>	<b>622.351.064.526</b>

**21. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASI LAINNYA**

**a. Pendapatan operasi lainnya**

	<b>Tahun yang berakhir pada tanggal</b>	
	<b>31 Desember 2016</b>	<b>31 Desember 2015</b>
Laba selisih kurs - neto	-	30.009.164.391
Klaim yang diterima	-	6.347.884.831
Lain-lain	67.892.582	-
<b>Total</b>	<b>67.892.582</b>	<b>36.357.049.222</b>

**b. Beban operasi lainnya**

	<b>Tahun yang berakhir pada tanggal</b>	
	<b>31 Desember 2016</b>	<b>31 Desember 2015</b>
Rugi selisih kurs - neto	5.158.658.871	-
Pajak dibayar dimuka yang tidak bisa dikreditkan	2.226.700.121	-
Pajak final atas pendapatan keuangan	140.530.967	127.997.972
Lain-lain	-	6.607.012
<b>Total</b>	<b>7.525.889.959</b>	<b>134.604.984</b>

**22. PENDAPATAN DAN BEBAN KEUANGAN**

**a. Pendapatan keuangan**

Akun ini seluruhnya merupakan pendapatan jasa giro.

**b. Beban keuangan**

Akun ini seluruhnya merupakan beban administrasi bank.

**PT JASA ARMADA INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**23. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI**

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi, yang dilakukan pada tingkat harga dan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak. Sifat relasi dan jenis transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Sifat relasi	Nama pihak berelasi	Jenis transaksi
Entitas induk	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Penjualan jasa, imbalan kerja karyawan, dividen
Entitas sepengendalian PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	PT Pelabuhan Tanjung Priok PT IPC Terminal Petikemas PT Pengerukan Indonesia PT Multi Terminal Indonesia	Penjualan jasa Penjualan jasa Sewa ruang kantor dan galangan Dividen
Entitas sepengendalian Pemerintah Republik Indonesia	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Pertamina (Persero) PT Pertamina Marine PT Pertamina Trans Kontinental	Transaksi keuangan Transaksi keuangan Penjualan jasa Penjualan jasa Penjualan jasa

- a. Perusahaan dan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) ("IPC"), pihak berelasi, menandatangani perjanjian Serah Operasi Fasilitas Pemanduan, Penundaan dan Kepil milik PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) ke PT Jasa Armada Indonesia tanggal 10 Maret 2014, dimana IPC memberikan hak kepada Perusahaan untuk mengoperasikan fasilitas pandu, tunda dan kepil milik IPC untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa pemanduan, penundaan dan pengepilan di lingkungan kerja IPC selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian.

Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan harus membayar kompensasi kepada IPC sebesar 10% dari pendapatan bruto atas pengoperasian fasilitas pandu, tunda dan kepil yang diserahkan ditambah Pajak Pertambahan Nilai. Biaya pemeliharaan dan perawatan fasilitas pandu, tunda dan kepil yang diserahkan menjadi beban Perusahaan, kecuali biaya pemeliharaan dan perawatan tingkat IV yang menjadi beban IPC (Catatan 13). Penambahan aset baru pada fasilitas pandu, tunda dan kepil yang diserahkan, baik yang melekat ataupun tidak, akan menjadi milik Perusahaan sepanjang menggunakan dana atau pembiayaan dari Perusahaan. Di samping itu, Perusahaan juga berhak mendapatkan kompensasi dari IPC apabila pendapatan dari kegiatan pelayanan jasa pemanduan lebih rendah dari biaya yang timbul.

Pada akhir masa perjanjian, fasilitas pandu, tunda dan kepil yang diserahkan harus diserahkan dan dikembalikan oleh Perusahaan kepada IPC. Terhadap aset baru yang ditambahkan oleh Perusahaan pada fasilitas pandu, tunda dan kepil yang diserahkan akan diberikan kompensasi berdasarkan harga buku atau harga pasar berdasarkan penilaian dari penilai independen, mana yang lebih rendah.

Berdasarkan Surat Direksi IPC No. UM.330/6/1/1/PI.II-16 tanggal 6 Januari 2016, efektif tanggal 1 Januari 2016, dilakukan perubahan perjanjian serah operasi menjadi perjanjian sewa dengan nilai sewa tertentu yang mengacu pada Surat Keputusan Direksi IPC No. HK.568/30/11/1/PI.II-15 tanggal 30 November 2015.

Perjanjian sewa antara Perusahaan dengan IPC tertuang dalam perjanjian No. HK.55/24/7.4/MS-16 tanggal 31 Maret 2016 tentang sewa menyewa atas aset milik PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) oleh PT Jasa Armada Indonesia selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017. Besaran sewa yang harus dibayar Perusahaan untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp68.961.000.000. Sedangkan untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, besaran sewa adalah sebesar Rp72.409.000.000.



**PT JASA ARMADA INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**23. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)**

- b. Berdasarkan Surat Direksi IPC No. PD.04/1/9/1/PI.II-14 tanggal 1 September 2014, kegiatan pelayanan jasa pemanduan dikerjasamakan dengan Perusahaan terhitung mulai tanggal 1 September 2014.
- c. Berdasarkan Kesepakatan Bersama Pengalihan Kegiatan Pelayanan Penundaan dan Pengepilan tanggal 1 September 2014 antara Perusahaan dengan tiap-tiap cabang pelabuhan IPC, kegiatan pelayanan jasa penundaan dan pengepilan di cabang-cabang pelabuhan IPC beralih kepada Perusahaan terhitung mulai tanggal 1 September 2014. Perusahaan bertindak selaku subkontraktor dari cabang-cabang pelabuhan IPC dalam kegiatan pelayanan penundaan dan pengepilan. Penerbitan dan penagihan nota serta penerimaan dari pelanggan dilakukan oleh cabang-cabang pelabuhan IPC, selanjutnya Perusahaan akan melakukan penagihan pendapatan pelayanan jasa pemanduan, penundaan dan pengepilan kepada kantor pusat IPC yang kemudian akan dipindahbukukan ke cabang-cabang pelabuhan IPC sebagai beban kerja sama mitra usaha.
- d. Berdasarkan Surat Direksi IPC No. UT.029/29/II/PI.II-16 tanggal 29 November 2016 tentang Segmentasi Bisnis Anak Perusahaan dan Cabang di Pelabuhan Tanjung Priok, kegiatan pelayanan jasa pemanduan akan dilaksanakan oleh IPC Cabang Tanjung Priok terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017.

**24. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING**

- a. Pada tanggal 3 Februari 2016, Perusahaan dan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pelaut dengan nomor perjanjian HK.55/24/04/MS\_16. Berdasarkan perjanjian tersebut, kedua pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian untuk memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan sesuai Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW) 1978 beserta amandemennya bagi Perusahaan melalui program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pelaut yang diselenggarakan oleh STIP dengan biaya sebesar Rp7.562.412.762 (Catatan 11).
- b. Pada tanggal 22 Mei 2015, Perusahaan dan Thome Marine Consultant Ltd (Thome) menandatangani Perjanjian Perkerjaan Jasa Konsultasi dan Mentoring *Basic Ship Management Fleet*. Berdasarkan perjanjian tersebut, ruang lingkup perkerjaan adalah program mentoring mengenai *fleet technical management, procurement and logistic for ship, accounting and budgetary control* dan *plan maintenance management*. Thome bersama dengan Perusahaan akan mengimplementasikan software AMOS dalam kegiatan perawatan harian, pembelian barang kebutuhan kapal dan sistem persediaan dengan nilai perkerjaan sebesar Rp10.511.199.372 (Catatan 11).

**25. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN**

Nilai wajar didefinisikan sebagai nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memiliki pengetahuan yang memadai dan berkeinginan untuk melakukan transaksi yang wajar, bukan merupakan penjualan yang dipaksakan atau likuidasi. Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan dicatat sebesar nilai wajar, atau sebaliknya, disajikan dalam jumlah tercatat apabila jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

**PT JASA ARMADA INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**25. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)**

Tabel berikut menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dengan estimasi nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016.

	<b>Disajikan Kembali, Catatan 28</b>	
	<b>Nilai tercatat</b>	<b>Estimasi nilai wajar</b>
<b>Aset keuangan</b>		
<b>Lancar</b>		
Kas dan bank	56.206.568.849	56.206.568.849
Piutang usaha		
Pihak ketiga	16.190.563.666	16.190.563.666
Pihak berelasi	321.745.309.796	321.745.309.796
Pendapatan yang masih akan diterima		
Pihak ketiga	808.143.496	808.143.496
Pihak berelasi	6.603.516.628	6.603.516.628
Piutang lain-lain		
Pihak ketiga	4.179.454	4.179.454
Pihak berelasi	96.835.856.442	96.835.856.442
<b>Total aset keuangan</b>	<b>498.394.138.331</b>	<b>498.394.138.331</b>
	<b>Nilai tercatat</b>	<b>Estimasi nilai wajar</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>		
<b>Jangka pendek</b>		
Utang usaha		
Pihak ketiga	9.125.075.334	9.125.075.334
Pihak berelasi	113.930.479.182	113.930.479.182
Utang lain-lain		
Pihak ketiga	8.071.533.323	8.071.533.323
Pihak berelasi	29.473.317.111	29.473.317.111
Uang titipan - karyawan	2.214.818.317	2.214.818.317
Beban akrual	88.761.896.324	88.761.896.324
<b>Total liabilitas keuangan</b>	<b>251.577.119.591</b>	<b>251.577.119.591</b>

Nilai tercatat aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan jangka pendek telah mendekati estimasi nilai wajarnya karena instrumen keuangan tersebut jatuh tempo dalam jangka pendek.

**26. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

Risiko utama dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Perusahaan dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perusahaan.

**Risiko mata uang asing**

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko perubahan nilai wajar arus kas di masa datang dari suatu instrumen keuangan yang berfluktuasi sebagai akibat perubahan nilai tukar mata uang asing yang digunakan oleh Perusahaan. Eksposur Perusahaan terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari utang bank jangka panjang dalam mata uang USD.

**PT JASA ARMADA INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**26. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Risiko mata uang asing (lanjutan)**

	Dalam mata uang asli	31 Desember 2016 (tanggal pelaporan)	2 Oktober 2017 (tanggal penyelesaian laporan keuangan)
<b>Aset</b>			
Kas dan bank	\$AS 1.458.823	19.600.740.588	19.724.745.783
Piutang usaha	\$AS 4.001.463	53.763.656.868	54.103.781.223
<b>Total</b>	<b>5.460.286</b>	<b>73.364.397.456</b>	<b>73.828.527.006</b>
<b>Liabilitas</b>			
Hutang usaha	\$AS 3	40.308	40.563
Beban Akrua	\$AS 22.110	297.069.960	298.949.310
<b>Total</b>	<b>22.113</b>	<b>297.110.268</b>	<b>298.989.873</b>
<b>Aset - neto</b>	<b>5.438.173</b>	<b>73.067.287.188</b>	<b>73.529.537.133</b>

Pada tanggal 31 Desember 2016, berdasarkan simulasi yang rasional, bila nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah mengalami pelemahan/penguatan sebesar 10%, dengan variabel lain tetap konstan, rugi sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 akan menjadi lebih tinggi/rendah sebesar Rp7.306.729.243, terutama akibat rugi/laba selisih kurs atas penjabaran aset dan liabilitas moneter yang didenominasi dalam Rupiah.

**Risiko suku bunga**

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan terhadap risiko suku bunga terutama terkait dengan bank. Perusahaan tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko suku bunga.

Tabel berikut menyajikan jumlah tercatat berdasarkan jatuh tempo dari aset dan liabilitas Perusahaan yang terekspos terhadap risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2016.

	Suku bunga mengambang	
	≤ 1 tahun	> 1 tahun
Kas di bank	56.092.537.248	-

**Risiko kredit**

Risiko kredit adalah risiko kerugian yang timbul akibat pelanggan atau pihak lawan gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan. Perusahaan mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, memberikan batasan atau plafon kepada pihak ketiga yang akan melakukan perdagangan kredit dengan Perusahaan dan melakukan pemantauan atas posisi piutang pelanggan secara teratur.

**PT JASA ARMADA INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**26. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Risiko kredit (lanjutan)**

Eksposur risiko kredit terhadap aset pada laporan posisi keuangan sebagai berikut:

	<b>Disajikan Kembali, Catatan 28</b>	
	<b>31 Desember 2016</b>	<b>31 Desember 2015</b>
Kas dan bank	56.206.568.849	87.998.806.433
Piutang usaha	337.935.873.462	333.872.726.727
Pendapatan yang masih akan diterima	7.411.660.124	7.255.605.075
Piutang lain-lain	96.840.035.896	27.878.579.142
<b>Total</b>	<b>498.394.138.331</b>	<b>457.005.717.377</b>

**Risiko likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perusahaan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya pada saat jatuh tempo.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

**Manajemen permodalan**

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman.

Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses manajemen permodalan selama periode pelaporan.

**27. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN**

- a. Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT Jasa Armada Indonesia No. HK.568/31/1/1/PI.II-17 tanggal 31 Januari 2017 tentang perubahan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, menyetujui untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dan menambah ruang lingkup pekerjaan Perusahaan. Keputusan tersebut telah diaktakan berdasarkan Akta No. 35 tanggal 20 Februari 2017 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-0004528.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 22 Februari 2017.

**PT JASA ARMADA INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**27. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

- b. Perusahaan dan IPC Cabang Tanjung Priok menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Jasa Penundaan Kapal di Pelabuhan Umum Tanjung Priok tanggal 17 April 2017, dimana pelayanan jasa penundaan pada Pelabuhan Tanjung Priok dilakukan oleh Perusahaan atas permintaan IPC. Perusahaan akan membayar kepada IPC sharing sebesar 5% dari pendapatan jasa penundaan. Perjanjian ini berjangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Perjanjian ini akan diakhiri terhitung sejak tanggal 1 Juli 2017.
- c. Perusahaan dan IPC Cabang Tanjung Priok menandatangani Surat Perjanjian tentang Pengelolaan dan Pengoperasian Motor Pandu Milik IPC Cabang Tanjung Priok oleh Perusahaan tanggal 17 April 2017, dimana Perusahaan mengelola dan mengoperasikan motor pandu milik IPC dengan biaya pengelolaan yang dibayarkan oleh IPC kepada Perusahaan sebesar Rp1.645.321.186 per bulan. Perjanjian ini berjangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Perjanjian ini akan diakhiri terhitung sejak tanggal 1 Juli 2017.
- d. Badan Koordinasi Penanaman Modal Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 4/1/30-PELABUHAN/PMDN/2017 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Perusahaan sebagai Badan Usaha Pelabuhan tanggal 15 Mei 2017 memutuskan diantaranya untuk memberikan izin usaha sebagai Badan Usaha Pelabuhan kepada Perusahaan sehingga Perusahaan dapat melakukan kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan, meliputi:
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat.
  - Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih.
  - Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan.
  - Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas.
  - Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan.
  - Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering dan Ro-Ro.
  - Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang.
  - Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang.
  - Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.

Perusahaan sebagai Badan Usaha Pelabuhan dapat melakukan kegiatan pengusahaan untuk lebih dari 1 (satu) terminal. Izin usaha sebagai Badan Usaha Pelabuhan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

Badan Usaha Pelabuhan dalam melakukan kegiatan usaha di pelabuhan harus berdasarkan pada konsesi yang diberikan oleh Otoritas Pelabuhan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun Perusahaan tidak mendapatkan konsesi pengusahaan pelabuhan atau mengelola jasa kepelabuhanan maka izin usaha sebagai Badan Usaha Pelabuhan dengan sendirinya dinyatakan tidak berlaku.

- e. Berdasarkan Surat Direksi IPC tentang Kerjasama Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemanduan tanggal 11 Oktober 2017, kegiatan pelayanan pemanduan menjadi tanggung jawab dan dicatat oleh masing-masing cabang IPC terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017.

**PT JASA ARMADA INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**27. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

- f. Berdasarkan Akta No. 25 tanggal 26 Juli 2017 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan komisaris dan direksi Perusahaan menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Dani Rusli Utama
Komisaris	: Jimmy Abu Bakar Nikijuluw
Komisaris	: Eko Hadi Rumecko
Komisaris	: Raymond Ivan Hasudungan Antonias Sianturi

**Direksi**

Direktur Utama	: Dawam Atmosudiro
Direktur	: Supardi
Direktur	: Herman Susilo

**28. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN**

Perusahaan menerbitkan dan menyajikan kembali laporan keuangannya tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebagaimana tercantum sehubungan dengan koreksi atas akun-akun di bawah atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya. Disamping hal tersebut, penerbitan kembali laporan keuangan juga berisi perubahan/pemutakhiran atas Catatan 1, 18, 26 dan 27. Sebelum penerbitan kembali laporan keuangan tersebut di atas, Perusahaan sebelumnya telah mengesahkan dan mengotorisasi penerbitan laporan keuangan tersebut pada tanggal 17 Februari 2017.

Saldo-saldo untuk laporan posisi keuangan tanggal 1 Januari 2015/31 Desember 2014 tidak disajikan kembali karena tidak terdampak koreksi tersebut di atas.

Pengaruh dari penerbitan dan penyajian kembali tersebut di atas terhadap beberapa akun tertentu pada laporan keuangan tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

**Laporan Posisi Keuangan**

	<b>Tanggal 31 Desember 2016</b>		
	<b>Disajikan Sebelumnya</b>	<b>Penyesuaian</b>	<b>Disajikan Kembali</b>
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Piutang usaha			
Pihak berelasi	459.629.999.454	(137.884.689.658)	321.745.309.796
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	-	96.835.856.442	96.835.856.442
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>568.280.916.116</b>	<b>(41.048.833.215)</b>	<b>527.232.082.901</b>

**PT JASA ARMADA INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**28. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

**Laporan Posisi Keuangan (lanjutan)**

	Tanggal 31 Desember 2016		
	Disajikan Sebelumnya	Penyesuaian	Disajikan Kembali
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Tagihan restitusi pajak	7.992.151.711	17.374.349.758	25.366.501.469
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>53.763.760.995</b>	<b>17.374.349.758</b>	<b>71.138.110.753</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>622.044.677.111</b>	<b>(23.674.483.457)</b>	<b>598.370.193.654</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Utang usaha			
Pihak berelasi	117.124.210.413	(3.193.731.231)	113.930.479.182
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>264.829.504.699</b>	<b>(3.193.731.231)</b>	<b>261.635.773.468</b>
<b>EKUITAS</b>			
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	16.476.585.667	3.601.338.971	20.077.924.638
Belum ditentukan penggunaannya	282.738.586.745	(24.082.091.197)	258.656.495.548
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>357.215.172.412</b>	<b>(20.480.752.226)</b>	<b>336.734.420.186</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>622.044.677.111</b>	<b>(23.674.483.457)</b>	<b>598.370.193.654</b>

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016		
	Disajikan Sebelumnya	Penyesuaian	Disajikan Kembali
Pendapatan - neto	868.655.521.736	(41.048.833.215)	827.606.688.521
<b>LABA USAHA</b>	<b>210.107.807.255</b>	<b>(41.048.833.215)</b>	<b>169.058.974.040</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN</b>	<b>210.847.678.368</b>	<b>(41.048.833.215)</b>	<b>169.798.845.153</b>
<b>MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN BADAN</b>			
Kini	(72.034.507.409)	17.374.349.758	(54.660.157.651)
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>140.738.586.745</b>	<b>(23.674.483.457)</b>	<b>117.064.103.288</b>
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>140.738.586.745</b>	<b>(23.674.483.457)</b>	<b>117.064.103.288</b>

**PT JASA ARMADA INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**28. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

Laporan Posisi Keuangan

	Tanggal 31 Desember 2015		
	Disajikan Sebelumnya	Penyesuaian	Disajikan Kembali
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Piutang usaha			
Pihak berelasi	360.886.951.673	(27.396.049.953)	333.490.901.720
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	-	27.396.049.953	27.396.049.953
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>466.656.117.887</b>	-	<b>466.656.117.887</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>501.599.763.193</b>	-	<b>501.599.763.193</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Utang usaha			
Pihak berelasi	18.969.950.589	(3.193.731.231)	15.776.219.358
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>218.513.743.844</b>	<b>(3.193.731.231)</b>	<b>215.320.012.613</b>
<b>EKUITAS</b>			
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	16.884.193.407	3.193.731.231	20.077.924.638
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>283.086.019.349</b>	<b>3.193.731.231</b>	<b>286.279.750.580</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>501.599.763.193</b>	-	<b>501.599.763.193</b>